

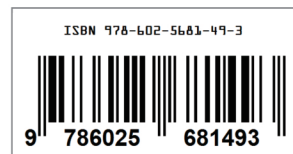
Komunikasi Politik di Indonesia

Penulis :

Akhyar Anshori, Abrar Adhani, Tommy Nautico, Alkomari, Sugeng Wahyudi, Slamet Mulyana, Agus Setiawan, Siantari Rihartono, Rose Emmaria Tarigan, M. Najib Husain, La Tarifu, Harnina Ridwan, Muhamad Rosit, Fitriya Yuliani, Rekho Adriadi, Linda Safitra, Fit Yanuar, Fauzi, Fathul Qorib, Kariman, Betty Gama, Bani Sudardi, Mahendra Wijaya, Wakit Abdullah, Benni Setiawan, Andreas Pandianga, Amalia Djuwita, Aceng Abdullah, Abdul Rani Usman, Muhamad Aras, Julius Christy, Yuli Nugraheni, Theresia Intan PH, Benedictus A Simangunsong, Dian Novitasari, Akhmad Rosihan, Bianca Virgiana, Fathul Qorib, Kariman, Loina Lalolo Krina Perangin-angin

Buku ini adalah salah satu dari tujuh judul buku yang diterbitkan dalam rangka merayakan Kongres ASPIKOM V di Solo tahun 2019. Penerbitan buku ini terlaksana atas kerjasama

bersama dengan



Editor :
Fajar Junaedi, Filosa Gita Sukmono

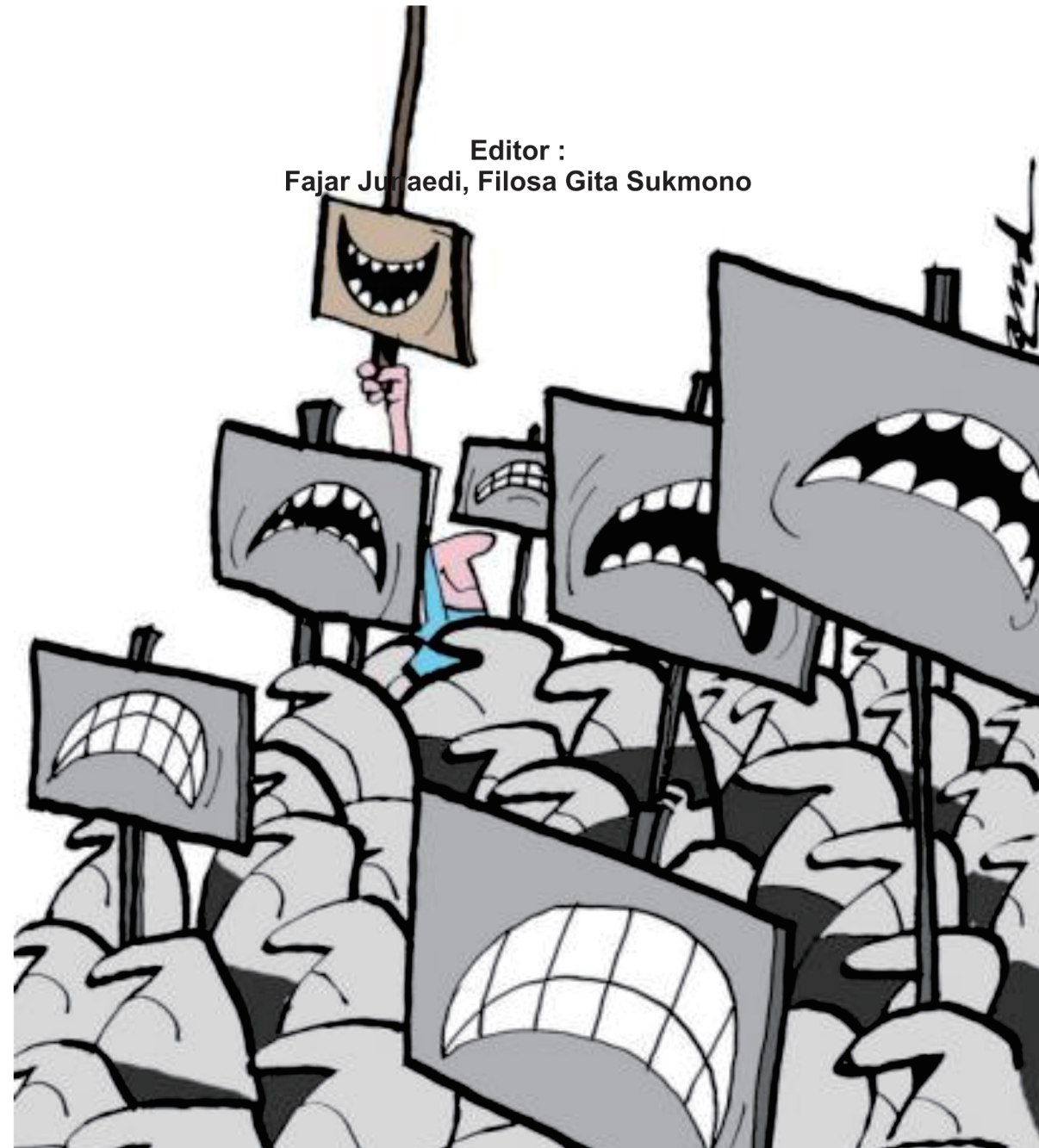
Komunikasi Politik
di Indonesia

ASPIKOM ASPIKOM
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KOMUNIKASI KORWIL DI YOGYAKARTA - JAWA TENGAH



Komunikasi Politik di Indonesia

Editor :
Fajar Junaedi, Filosa Gita Sukmono



Komunikasi Politik di Indonesia

Editor :

Fajar Junaedi, Filosa Gita Sukmono

Penulis :

Akhyar Anshori, Abrar Adhani, Tommy Nautico, Alkomari, Sugeng Wahyudi, Slamet Mulyana, Agus Setiawan, Siantari Rihartono, Rose Emmaria Tarigan, M. Najib Husain, La Tarifu, Harnina Ridwan, Muhamad Rosit, Fitria Yuliani, Rekho Adriadi, Linda Safitra, Fit Yanuar, Fauzi, Fathul Qorib, Kariman, Betty Gama, Bani Sudardi, Mahendra Wijaya, Wakil Abdullah, Benni Setiawan, Andreas Pandianga, Amalia Djuwita, Aceng Abdullah, Abdul Rani Usman, Muhamad Aras, Julius Christy, Yuli Nugraheni, Theresia Intan PH, Benedictus A Simangunsong, Dian Novitasari, Akhmad Rosihan, Bianca Virgiana, Fathul Qorib, Kariman, Loina Lalolo Krina Perangin-angin.



Komunikasi Politik di Indonesia

Copyright © penulis

Hak cipta pada penulis dan dilindungi oleh Undang-undang (All Rights Reserved).
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I : 2019
266 (viii + 258 hlm) halaman, 15,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-602-5681-49-3

Editor :

Fajar Junaedi, Filosa Gita Sukmono

Penulis :

Akhyar Anshori, Abrar Adhani, Tommy Nautico, Alkomari, Sugeng Wahyudi, Slamet Mulyana, Agus Setiawan, Siantari Rihartono, Rose Emmaria Tarigan, M. Najib Husain, La Tarifu, Harnina Ridwan, Muhamad Rosit, Fitria Yuliani, Rekho Adriadi, Linda Safitra, Fit Yanuar, Fauzi, Fathul Qorib, Kariman, Betty Gama, Bani Sudardi, Mahendra Wijaya, Wakit Abdullah, Benni Setiawan, Andreas Pandianga, Amalia Djuwita, Aceng Abdullah, Abdul Rani Usman, Muhamad Aras, Julius Christy, Yuli Nugraheni, Theresia Intan PH, Benedictus A Simangunsong, Dian Novitasari, Akhmad Rosihan, Bianca Virgiana, Fathul Qorib, Kariman, Loina Lalolo Krina Perangin-angin.

Desain Cover :

Ibnu Teguh W

Lay Out :

Ibnu Teguh W

Penerbit:

Buku Litera Yogyakarta
Minggiran MJ II/1378, RT 63/17 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 08179407446. Email: bukulitera3@gmail.com

Kata Pengantar

Kajian tentang komunikasi politik merupakan tema yang menarik banyak akademisi Ilmu Komunikasi di Indonesia sejak reformasi tahun 1998. Demokratisasi politik membawa perubahan besar dalam perilaku komunikasi politik di Indonesia kontemporer. Media massa dan media sosial dimanfaatkan secara massif dan terorganisir oleh para aktor politik untuk meraup dukungan publik agar memilih mereka dalam pemilu.

Merayakan kajian di ranah komunikasi politik, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) menerbitkan buku *Komunikasi Politik di Indonesia* yang sedang Anda pegang ini. Buku ini berisi berbagai kajian dari para dosen dan akademisi Ilmu Komunikasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia di ranah komunikasi politik.

Kekayaan buku ini adalah buku ini terbit hanya berselang dua bulan setelah Pemilu tahun 2019, menjadikan isi buku ini banyak yang berkisar tentang fenomena perilaku politik di sekitar Pemilu. Kajian dan analisis yang bernas dari para penulis dalam buku ini layak menjadi referensi bagi mata kuliah Komunikasi Politik di berbagai perguruan tinggi, sekaligus menjadi rujukan dalam penelitian di ranah komunikasi politik.

Buku ini sekaligus adalah kado bagi Kongres V ASPIKOM yang berlangsung di Kota Solo tanggal 24 sampai 26 Juli 2019. Selamat berkongres ASPIKOM !

Yogyakarta, 12 Juli 2019

Editor

Fajar Junaedi,
Filosa Gita Sukmono

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pengaruh Budaya dalam Pesan Politik Terhadap Perilaku Pemilih Kota Medan Pada Pemilu Tahun 2019 <i>Akhyar Anshori, Abrar Adhani</i>	1
Relasi Kuasa Joko Widodo dan Sepakbola Menjelang Pemilihan Presiden 2019 <i>Tommy Nautico, Alkomari</i>	9
Analisis Isi Pemberitaan #2019gantipresiden Media Online Kompas. Com <i>Sugeng Wahyudi</i>	21
Peran Pondok Pesantren dan Kyai dalam Konstelasi Politik di Indonesia <i>Slamet Mulyana, Agus Setiawan</i>	31
Peran Komunikasi Politik Sebagai Infrastruktur dalam Membangun Pendidikan dan Partisipasi Politik di Masyarakat <i>Siantari Rihartono</i>	41
Peran Literasi Media Generasi Z Sebagai Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019 <i>Rose Emmaria Tarigan</i>	53
Ruang Media Pemberitaan Lokal bagi Calon Legislatif DPRD Sultra pada Pemilu 2019 <i>M.Najib Husain, La Tarifu, Harnina Ridwan</i>	67
Problematika Alih Generasi Kepemimpinan Politik Pasca Pemilu 2019 <i>Muhamad Rosit</i>	79

Pemanfaatan Sosial Media Instagram dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Ombudsman RI Bengkulu) <i>Fitria Yuliani, Rekho Adriadi, Linda Safitra</i>	89
Perang Dingin Ala Prabowo-Jokowi di Era <i>Post-Truth</i> (Kajian Komunikasi Berbentuk Perbandingan Dengan Perang Dingin As-Uni Soviet Abad 20) <i>Fit Yanuar</i>	97
Komunikasi Politik dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Aceh Utara <i>Fauzi</i>	107
Kualitas Berita Pilkada di Media <i>Online</i> Malang Raya <i>Fathul Qorib, Kariman</i>	119
Blusukan dan Kampanye Pilkada Kota Solo <i>Betty Gama, Bani Sudardi, Mahendra Wijaya, Wakit Abdullah</i>	135
Membangun Narasi Kebangsaan <i>Benni Setiawan</i>	141
Komunikasi Politik Calon Anggota DPD RI Melalui Media Sosial di Pemilu 2019 <i>Andreas Pandianga</i>	147
Fenomena Pendapat Masyarakat Seputar Pemilu Pilpres 2019 <i>Amalia Djuwita</i>	157
Iklan Partai Politik dan Pemilu 2019 <i>Aceng Abdullah</i>	167
Fenomena Demokrasi di Era Media Sosial <i>Muhamad Aras</i>	177
Pengaruh Terpaan Pemberitaan Partai Golkar Terkait Pendaftaran Bakal Caleg Mantan Napi Korupsi Terhadap Citra Partai Golkar pada Masyarakat Surabaya <i>Julius Christy, Yuli Nugraheni, Theresia Intan PH</i>	187
Penyebaran Informasi Bohong di Media Sosial Pemilihan Presiden 2019 :Sebuah Partisipasi Publik di Era Digitalkah? <i>Benedictus A Simangunsong</i>	207

Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Baru dalam Memenangkan Kontestasi Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu <i>Dian Novitasari, Akhmad Rosihan, Bianca Virgiana</i>	215
Kualitas Berita Pilkada di Media Online Malang Raya <i>Fathul Qorib, Kariman</i>	225
Perempuan dalam Jejaring Diskusi Politik di Media Sosial <i>Loina Lalolo Krina Perangin-angin</i>	243
Tentang Editor	207

Pengaruh Terpaan Pemberitaan Partai Golkar Terkait Pendaftaran Bakal Caleg Mantan Napi Korupsi Terhadap Citra Partai Golkar pada Masyarakat Surabaya

Julius Christy, Yuli Nugraheni, Theresia Intan PH

Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Pendahuluan

Teori S-O-R terdiri dari stimuli yang diterima oleh sebuah organisme, organisme merupakan komunikan yang mendapatkan stimuli lalu memberikan respon terhadap stimuli tersebut. Stimuli dalam penelitian ini adalah pengaruh terpaan yang diterima oleh organisme yang merupakan masyarakat Surabaya, sedangkan respon yang akan diteliti adalah pengaruh terpaan pemberitaan di media massa terhadap citra.

Citra merupakan kesan, perasaan dan gambaran publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan, sehingga citra positif perlu diciptakan dengan sengaja dan dipelihara sepanjang organisasi atau partai itu ingin tetap eksis ditengah-tengah publiknya (Arifin dalam Muchtar, 2016:139-140).Citra politik memiliki makna walaupun tidak selamanya selaras dengan realitas politik yang sebenarnya.Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang fenomena politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi opini publik atau pendapat umum (Arifin, 2014:23).

Citra politik memiliki makna walaupun tidak selamanya selaras dengan realitas politik yang sebenarnya.Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang fenomena politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi opini publik atau pendapat umum (Arifin, 2014:23).

Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang media baik jenis media, frekuensi maupun durasi penggunaan (Ardianto

dan Erdinaya dalam Novianto, 2016: 835). Jenis media dapat dilihat dari bagaimana khalayak mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media *online* sebagai jenis media. Frekuensi adalah berapa kali seseorang mengonsumsi media untuk mendapatkan informasi. Sedangkan durasi digunakan untuk melakukan penghitungan berapa lama khalayak bergabung dengan suatu media. Atensi atau *Attention* adalah keadaan ketika rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah (Rakhmat, 2012:51). Adanya terpaan media secara terus menerus, dapat menimbulkan persepsi dan citra politik khalayak yang juga tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya (Arifin, 2014:26). Pengaruh dari media massa dapat membentuk citra dan dapat mempengaruhi masyarakat terhadap citra tersebut. Salah satunya melalui pemberitaan mengenai Partai Golkar yang tetap mencalonkan bakal caleg mantan napi korupsi walaupun pada saat itu Bawaslu telah mengeluarkan peraturan yang melarang mantan napi korupsi untuk dicalonkan. Pemberitaan ini muncul pertama kali pada bulan Juli 2018 dan dimuat oleh beberapa media *online* seperti Merdeka.com dan BBC Indonesia.

Menurut media *online* Merdeka.com, hampir setiap partai memiliki caleg bekas terpidana korupsi dan partai Gerindra berada di urutan pertama dengan 27 orang, dan diikuti oleh Golkar dengan 25 orang mantan napi korupsi. Selain itu ada partai NasDem dengan 17 orang, Partai Berkarya dengan 16 orang dan Hanura dengan 15 orang serta beberapa partai lainnya. Total caleg yang dicalonkan sejumlah 199 orang, Jumlah caleg tersebut merupakan total dari caleg yang akan melakukan kontestasi dalam tingkat DPRD maupun DPD. Hal ini sangat disayangkan oleh Bawaslu yang sudah membuat fakta integritas dan sudah ditandatangani oleh partai-partai tersebut. Fakta integritas ini berisi tentang dukungan terhadap klausul untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi sebagai bacaleg.

Media *online* Tempo.co pada tanggal 17 Juli memuat berita serupa dengan judul “Golkar Daftarkan Caleg Mantan Napi Korupsi”. Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa partai Golkar telah menyeleksi para kandidat yang akan menjadi calon legislatif dan Partai Golkar menyetujui Nurlif dan Iqbal Wibisono untuk maju karena keduanya merupakan pimpinan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar di daerahnya. Padahal keduanya merupakan mantan napi korupsi. T.M Nurlif dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan karena terbukti terlibat dalam perkara suap pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi

Gubernur Senior Bank Indonesia. Sedangkan Iqbal Wibisono dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena terbukti terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Wonosobo Selain itu Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kesempatan kepada mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri. Kedua orang tersebut juga menggugat peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi dicalonkan sebagai anggota legislatif ke mahkamah agung.

Media *online* BBC News Indonesia memberitakan “Berbagai Parpol ‘Tetap Nekad’ Usung Bakal Caleg Mantan Napi Korupsi ke KPU” yang muncul pada tanggal 18 Juli. Dalam pemberitaan tersebut Partai Golkar membenarkan bahwa mendaftarkan caleg yang kebetulan pernah terjerat kasus Korupsi. Partai Golkar tidak menyebutkan nama-nama mantan napi korupsi yang didaftarkan tetapi membenarkan juga bahwa ada sosok eks-napi korupsi yang dicalonkan di tingkat DPRD tingkat provinsi dan/kabupaten kota. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera-Bali DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, mengemukakan bahwa jika yang bersangkutan tidak memenuhi syarat berkaitan dengan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 yang menolak mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif, masih ada satu mekanisme lagi yaitu banding atau Bawaslu.

Media *online* Kompas juga memuat pemberitaan serupa pada tanggal 21 September dengan judul “Ini Daftar 26 Caleg Eks Koruptor DPRD Kabupaten/Kota”. Dari pemberitaan ini diketahui beberapa nama caleg mantan narapidana korupsi yang maju di tingkat DPRD Kabupaten/ Kota. Selain itu ada sejumlah nama yang semula dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU lantaran statusnya sebagai mantan napi korupsi yang harus diloloskan sebagai caleg. Diantaranya adalah dari Partai Gerindra, Alhajad Syahyan, Ferizal, dan Mirhammuddin; Dari Partai PDIP Idrus Tadji; Dari Partai Golkar, Heri Baelanu, Dede Widarso, dan Saiful T Lami; Dari Partai Nasdem, Abu bakar dan Edi Ansori; Dari Partai Garuda, Julius Dakhi dan Ariston Moho; Dari Partai Berkarya, Yohanes Marinus Kota dan Andi Muttamar Mattotorang; Dari PKS, Maksum DG Mannasa; Dari Partai Perindo, Zukifikri; Dari Partai Amanat Nasional, Masri, Muhammad Afrizal, dan Bahri Syamsu Arief; Dari Partai Hanura, Warsit dan Moh Nur Hasan; Dari Partai Demokrat, Jones Khan, Jhony Husban, Syamsudin, dan Darmawaty Dareho; Dari Partai PKP Indonesia, Matius Tungka dan Joni Cornelius Tondok.

Pada penelitian ini citra yang ingin dilihat oleh penulis adalah citra politik. Citra politik berkaitan dengan sosialisasi politik dan terbentuk melalui pembelajaran politik seseorang baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik. Citra politik juga mencakup beberapa hal diantaranya seluruh pengetahuan politik seseorang, preferensi yang melekat dari peristiwa politik, dan pengharapan yang mungkin terjadi terhadap objek dalam situasi tersebut (Arifin dalam Muchtar, 2016:140). Penelitian ini akan menggunakan metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Silalahi, 2012:293).

Penulis menggunakan metode survei untuk memperoleh informasi dari sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi masyarakat Surabaya. Kriteria masyarakat Surabaya yang dijadikan responden adalah mengetahui pemberitaan di media massa serta memiliki umur 17 tahun keatas. Umur ini dipilih karena menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004, penduduk yang memiliki umur 17 tahun ke atas pada saat tanggal pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah dinyatakan dapat memberikan suaranya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.

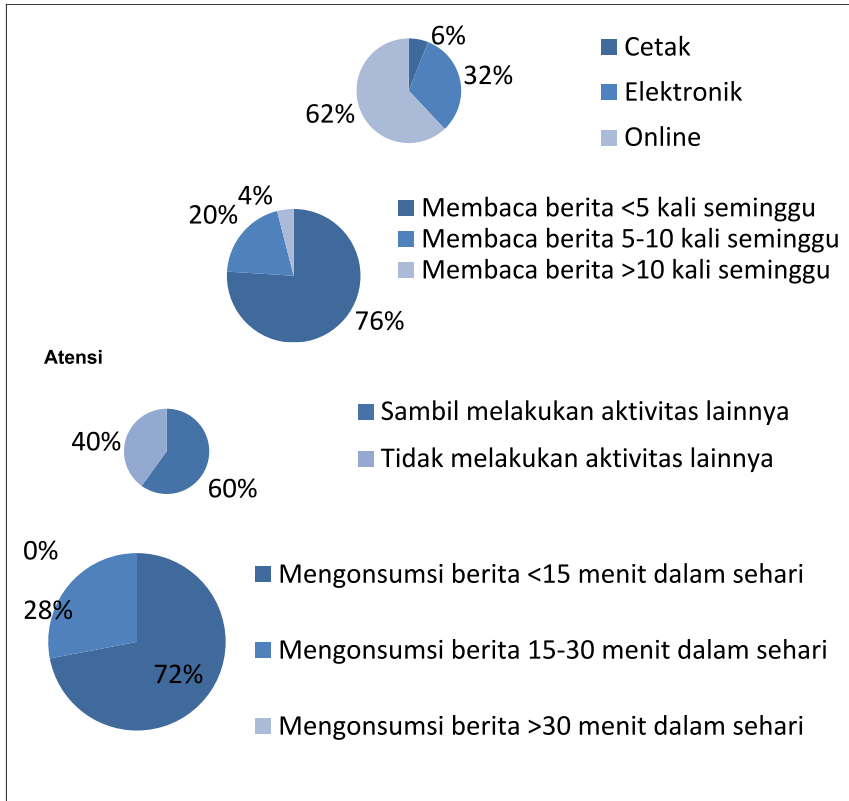
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh terpaan pemberitaan Partai Golkar terkait pendaftaran bakal caleg mantan korupsi terhadap citra Partai Golkar pada masyarakat Surabaya?

Penelitian ini menggunakan metode survei. Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi dengan tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Secara umum metode survei terdiri dari survei deskriptif dan survei eksplanatif. Pembagian ini berdasarkan pada tataran atau cara periset menganalisis data yang telah dikumpulkan dan jumlah variabel yang diteliti (Kriyantono, 2012:59). Penelitian ini menganalisis data secara eksplanatif. Maka dari itu, jenis survei yang digunakan pada penelitian ini adalah survei eksplanatif.

Pemrosesan data atau pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami (Silalahi 2012:20). Pada penelitian ini, penulis mengolah data menggunakan seluruh proses transformasi data, yaitu melalui kegiatan penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi.

Pembahasan

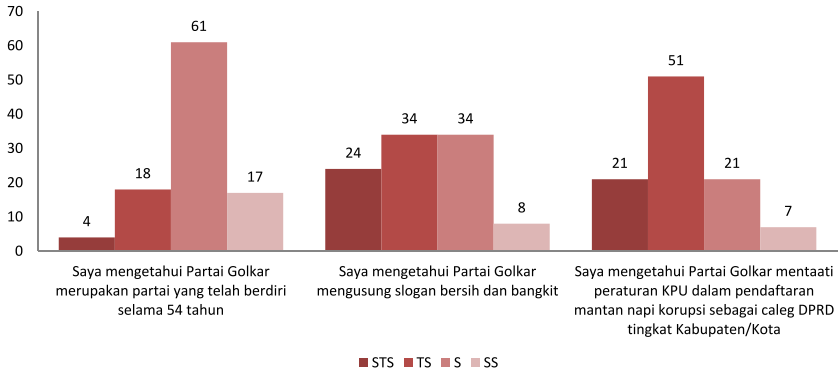
Berikut pemaparan data mengenai sumber membaca berita, atensi, durasi dan frekuensi membaca berita dari responden.



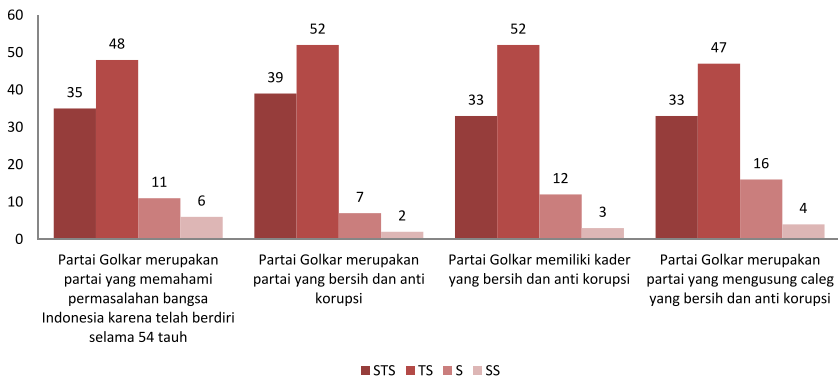
Gambar 1.

Berdasarkan gambar 1, terdapat mayoritas responden terkena terpaan dari media *online* yaitu sebesar 62%.. dengan frekuensi membaca berita <5 kali seminggu dengan angka 76% mayoritas responden membaca berita selama 15 menit dalam sehari sebesar 72% dan disusul dengan responden yang mengonsumsi berita selama 15-30 menit dalam sehari dengan 28% sedangkan peneliti tidak menemukan responden yang mengonsumsi berita selama lebih dari 30 menit dalam sehari. Responden juga membaca berita sambil melakukan aktivitas lainnya sebesar 60%.

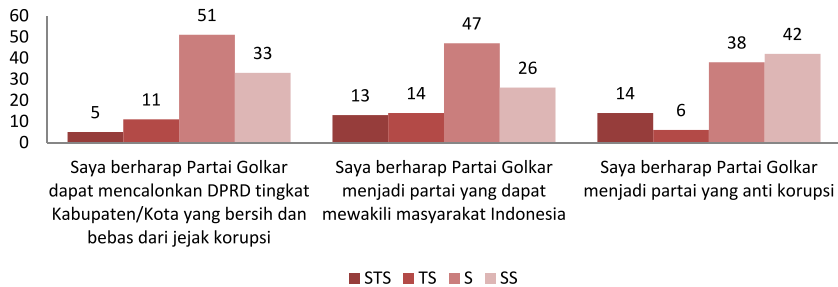
Kognisi



Afeksi



Konasi



Deskripsi Identitas Responden

Total responden dilihat dari jenis kelamin menyebutkan bahwa responden yang lebih banyak dijumpai adalah laki-laki yaitu sebanyak 71% sedangkan responden berjenis kelamin perempuan dengan 29%. Berdasarkan data BPS tahun 2017, kota Surabaya memiliki total 2.599.796 penduduk dengan pembagian 1.288.118 jiwa berjenis kelamin laki-laki sedangkan 1.312.538 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan Tabel IV.6 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Surabaya yang menjadi responden berusia < 21 tahun yaitu sebesar 70%, sedangkan responden berusia 17-21 tahun hanya 30%. Dalam hal ini usia 17-21 tahun merupakan usia pemilih pemula yaitu masyarakat yang belum pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Responden dilihat dari pendidikan terakhir, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang mengetahui pemberitaan Partai Golkar merupakan berpendidikan SMA dengan 58% sedangkan yang paling sedikit adalah SD, dan SMP dengan 0% dari keseluruhan total responden.

Responden berdasarkan pengeluaran per bulan menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menonton pemberitaan Partai Golkar adalah masyarakat dengan pengeluaran per bulan antara 2 juta hingga 3 juta dengan presentase sebesar 60% dari total responden. Berdasarkan tabel IV.9, mayoritas responden ada pada SES B dengan presentase 60% dan disusul dengan SES A dengan presentase 40%.

Responden dilihat dari kader atau simpatisan dari partai tertentu menunjukkan bahwa mayoritas dari responden merupakan bukan kader atau simpatisan partai tertentu yaitu sebesar 88% dari total responden.

Total responden berdasarkan cara memilih calon legislatif menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih calon legislatif dengan mencoblos kandidat perseorangnya dengan presentase 49% dari total responden. Pada pemilihan calon legislatif tingkat kabupaten atau kota, pemilihan dapat dilakukan dengan mencoblos partai atau calon perseorangnya. Berdasarkan UU pemilu pasal 35 ayat 2 huruf e pemberian suara pada surat suara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada nomor, atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon dalam partai politik yang sama.

Deskripsi Terpaan Pemberitaan

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan variabel penelitian yaitu terpaan pemberitaan. Variabel terpaan pemberitaan terbagi dalam empat komponen yaitu jenis media, frekuensi, durasi, dan atensi. Berikut ini akan dijabarkan mengenai komponen tiap elemen terpaan pemberitaan.

Penulis memberikan beberapa pilihan jenis media kepada responden untuk mengetahui jenis media apa yang digunakan responden sebagai tempat referensi membaca atau mengetahui pemberitaan Partai Golkar terkait pendaftaran caleg mantan napi korupsi. Terdapat tiga jenis media yang dapat dipilih oleh responden yaitu cetak, elektronik, dan *online*. Mayoritas responden terkena terpaan dari media *online* yaitu sebesar 62%.

Berdasarkan survei dari Nielsen pada triwulan ketiga tahun 2017, kebiasaan membaca orang Indonesia telah mengalami pergeseran dimana tingkat pembelian koran menurun dari 28% ke 20% dengan jumlah pembaca 4,5 juta orang, penetrasi media digital meningkat hingga 11% dengan jumlah pembaca 6 juta orang.

Berdasarkan hasil survei *Indonesian Digital Association* yang dilakukan sepanjang tahun 2015, presentase konsumsi berita melalui media online mencapai angka 96% dan disusul dengan televisi sebesar 91%, surat kabar 31% dan radio sebesar 15%. Mayoritas masyarakat Surabaya mengkonsumsi berita di media *online* yaitu sebesar 62%.

Mayoritas responden membaca berita <5 kali seminggu dengan angka 76%. Berdasarkan Jallaludin Rakhmat, memori adalah sebuah sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya (2012:61).

Frekuensi penggunaan media mengumpulkan data khalayak tentang berapa kali seseorang menggunakan media dalam seminggu (Novianto, 2016:853). Mayoritas responden membaca berita <5 kali seminggu. Dengan mayoritas responden membaca berita <5 kali seminggu selama satu bulan, maka memiliki peluang bahwa responden masih mengingat isi berita mengenai Partai Golkar terkait pendaftaran caleg mantan napi korupsi.

Responden dilihat dari durasi membaca berita dalam sehari, diketahui bahwa mayoritas responden membaca berita selama 15 menit dalam sehari sebesar 72% dan disusul dengan responden yang mengonsumsi berita selama 15-30 menit dalam sehari dengan 28% sedangkan peneliti

tidak menemukan responden yang mengonsumsi berita selama lebih dari 30 menit dalam sehari.

Durasi digunakan untuk menghitung berapa lama khalayak bergabung dengan suatu media atau berapa lama khalayak menonton suatu program (Novianto, 2016:835). Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, mayoritas responden mengonsumsi berita selama <15 menit dalam sehari sebesar 72% disebabkan karena mayoritas responden menggunakan beberapa aplikasi berita yang biasanya aplikasi berita menampilkan berita lanjutan yang relevan dengan berita terkait sehingga responden membaca berita dengan lama dan dapat menangkap informasi dari berita terkait.

Total responden dilihat dari atensi, dapat diketahui bahwa mayoritas penumpang masyarakat Surabaya membaca berita sambil melakukan aktivitas lainnya sebesar 60%. Berdasarkan Jalludin Rakhmat, atensi merupakan proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah (2012:51). Tabel diatas menandakan bahwa mayoritas responden membaca berita dengan melakukan aktivitas lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden tidak sepenuhnya perhatian pada berita yang dibaca.

Mayoritas responden mengetahui atau membaca pemberitaan terkait pendaftaran caleg mantan napi korupsi dari media *online*. Berdasarkan perhitungan skor interval terpaan pemberitaan, angka mean di bawah nilai 1.51 dinyatakan memiliki terpaan rendah dan untuk angka mean diatas 1.50 dinyatakan memiliki terpaan tinggi. Berdasarkan perhitungan mean dari variabel terpaan pemberitaan, dihasilkan nilai mean sebesar 1.32.

Diketahui dari deskripsi terpaan pemberitaan, masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini mengonsumsi pemberitaan dari media *online*, jarang menonton atau membaca pemberitaan di media *online*, membaca pemberitaan dengan waktu yang singkat, dan dalam membaca pemberitaan yang ada responden tidak sepenuhnya perhatian dengan pemberitaan yang ada.

Deskripsi Citra Politik

Variabel citra politik diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu: kognisi, afeksi, dan konasi. Berdasarkan kuisioner yang disebar.

Mean rata-rata responden untuk variabel kognisi pada angka 2,43. Berdasarkan perhitungan nilai interval, angka yang memiliki nilai dibawah 2,51 berada pada citra negatif sehingga dapat disimpulkan pada variabel kognisi memiliki citra negatif. Nilai mean tertinggi ada pada pernyataan K1 dengan pernyataan “Saya mengetahui Partai Golkar merupakan partai yang telah berdiri selama 54 tahun” memiliki nilai 2,91 poin dan menandakan positif. Peneliti memandang hal ini merupakan hal yang wajar karena Partai Golkar merupakan satu satunya partai yang pernah berkuasa selama lebih dari 20 tahun sehingga menjadi tidak wajar jika responden tidak mengetahui bahwa Partai Golkar telah berdiri 54 tahun.

Pernyataan K2 dengan “Saya mengetahui Partai Golkar mengusung slogan Bersih dan Bangkit” memiliki nilai mean 2,26 yang berarti negatif. Mayoritas responden menjawab setuju dengan 34% dan menjawab tidak setuju dengan angka yang sama yaitu 34%. Nilai mean menjadi negatif karena sebagian besar responden menjawab pernyataan tersebut dengan respon yang menandakan atau menghasilkan nilai negatif yaitu TS dan STS dengan presentase total 58%.

Peneliti menemukan hal yang menarik pada pernyataan K3 yang berisi “Saya mengetahui Partai Golkar mentaati peraturan KPU dalam pendaftaran mantan napi korupsi sebagai caleg DPRD tingkat Kabupaten/Kota”. Mayoritas responden dengan presentase 51% menjawab tidak setuju bahwa Partai Golkar mentaati peraturan KPU dalam mendaftarkan caleg mantan napi korupsi. Pernyataan ini memiliki mean 2,14 yang menandakan negatif atau bisa diartikan mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa Partai Golkar mentaati peraturan KPU.

Dilansir oleh detik.com, Mahkamah Agung memutuskan pengujian peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 yang melarang narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif, MA menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sehingga menyebabkan konsekuensi yuridis dimana mantan narapidana diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Tidak hanya detik.com, media *online* kompas, kompas.com, juga memuat berita yang serupa yang menjelaskan pembatalan peraturan KPU tidak sepenuhnya pada nomor 20 tahun 2018 melainkan hanya pada frasa mantan napi korupsi sementara larangan untuk mantan napi kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tetap berlaku. Berdasarkan pemberitaan tersebut, pencalonan napi mantan korupsi tidak menyalahi peraturan manapun.

Partai politik memberikan tanggapan beragam terhadap putusan MA yang membatalkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018. Seperti dilansir oleh Kompas.com, ada sejumlah partai politik yang berniat untuk menarik caleg yang berstatus eks koruptor dan mengganti caleg yang bersih seperti PDI-P dan Partai Perindo. Tetapi ada juga partai yang tetap memaksa untuk mengusung caleng mantan napi koruptor seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Hal ini menghasilkan respon beragam dari masyarakat diantaranya sebuah partai harusnya mampu menyeleksi caleg yang mereka dukung karena kader merupakan cerminan dari partai itu. Berdasarkan beberapa pemberitaan di atas, memang benar mendaftarkan caleg mantan napi korupsi tidak menyalahi peraturan mana pun, namun hal tersebut ditakutkan dapat lebih lagi menurunkan kepercayaan publik serta citra dari partai politik khususnya Partai Golkar.

Elemen afeksi pada citra politik Partai Golkar menghasilkan angka yang bernilai mean 1.84 yang dapat diartikan memiliki nilai negatif berdasarkan perhitungan interval karena angka 1.84 memiliki nilai tidak lebih tinggi dari 2.51. Pernyataan A2 “Partai Golkar merupakan partai yang bersih dan anti korupsi” mendapatkan nilai mean terendah dari semua pernyataan dalam elemen afeksi dengan nilai mean 1.72. Pernyataan A3 mendapat mean lebih tinggi dari pernyataan A2 yaitu 1.85 dengan mayoritas 52% responden menjawab TS pada pernyataan “Partai Golkar memiliki kader yang bersih dan anti korupsi”. Selain itu, pada tabel IV. 17 dapat diketahui bahwa pernyataan A1 “Partai Golkar merupakan partai yang memahami permasalahan bangsa Indonesia karena telah berdiri selama 54 tahun” mendapatkan nilai mean 1.88 dengan mayoritas responden menjawab TS dengan presentase 48%. Pernyataan A4 mendapatkan nilai mean paling tinggi pada elemen afeksi dengan nilai mean 1.91 dengan pernyataan “Partai Golkar merupakan partai yang mengusung caleg yang bersih dan anti korupsi”. Mayoritas responden memilih jawaban TS dengan presentase 47%.

Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan pernyataan “Partai Golkar merupakan partai yang bersih dan anti korupsi”.Peneliti memandang jawaban responden pada pernyataan A2 wajar mendapatkan nilai mean terendah dengan angka 1.72 yang berarti negatif.Pada pernyataan A4 yang berisi “Partai Golkar merupakan partai yang mengusung caleg yang bersih dan anti korupsi” mendapatkan nilai mean 1.91 dan juga berarti negatif. Dilansir dari laman merdeka.com, Partai Golkar menjadi

partai yang terbanyak dalam caleg mantan napi korupsinya. Berdasarkan pemberitaan tersebut diketahui bahwa ada 8 caleg dari Partai Golkar yang merupakan mantan napi korupsi, disusul oleh partai Gerindra dengan 6 orang. Dari pemberitaan tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat memandang Partai Golkar bukanlah partai yang bersih dan anti korupsi karena mencalonkan mantan napi korupsi menjadi caleg.

Pernyataan A3 yang berisi “Partai Golkar memiliki kader yang bersih dan anti korupsi” juga mendapatkan nilai rata-rata negatif. Hal ini sejalan dengan pemberitaan dari tempo.co dengan judul “Lima Elit Partai Golkar ini Terjerat Kasus Korupsi”. Pemberitaan tersebut memuat beberapa elit Partai Golkar yang tersandung kasus korupsi. Diantaranya ada Idrus Marham yang menjadi tersangka suap kasus PLTU Riau-1 yang pada saat itu sedang menjabat menjadi Menteri Sosial di Kabinet Kerja. Selain Idrus Marham, ada Eni Maulani Saragih yang menjadi tersangka korupsi kasus proyek PLTU Riau-1 yang pada saat itu sedang menjabat menjadi Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan DPP Partai Golkar periode 2016-2019. Selain kedua nama tersebut, ada Setya Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP tahun 2018 silam. Markus Nari yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP pada tahun 2018 silam. Tidak hanya lima elit Partai Golkar, ada beberapa kader daerah Partai Golkar yang juga tersandung kasus korupsi. Diantaranya adalah Bupati Jombang sekaligus Ketua DPD Golkar Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko; Bupati Subang Imas Aryumningsih; Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari; Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti; Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi dan Walikota Tegal Siti Masitha.

Pernyataan A1 memiliki nilai mean tertinggi pada elemen afeksi dibandingkan dengan pernyataan yang lainnya. Peneliti menemukan hal yang menarik pada pernyataan A1. Mayoritas responden menjawab tidak setuju jika Golkar memahami permasalahan Indonesia karena telah berdiri selama 54 tahun dengan presentase 48%. Tidak hanya telah berdiri selama 54 tahun, Partai Golkar pernah menjadi satu-satunya partai yang berkuasa selama 32 tahun pada masa Orde Baru.

Vickers dalam bukunya *A History of Modern Indonesia* menjelaskan Partai Golkar pernah menjadi *ruling party* selama masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Keberhasilan Partai Golkar menjadi *ruling party* selama 32 tahun bersamaan dengan beberapa kecurangan.

In Government thinking, the New Order represented an 'organic; state, embodied in Golkar. The nation was seen as one big family, where there should be no signs of dissent against the benevolent patriarch. Thus the idea of an opposition in the people's assembly was declared 'un-indonesian', as were strikes and other elements of conflict that might disturb the goal of social harmony (Vickers, 2013:181).

Ide untuk membangun pihak oposisi pada DPR dipandang dapat mengganggu keseimbangan sosial. Selain itu, pemerintah berkuasa pada saat itu melihat hanya Golkar yang menjadi perwakilan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tidak adanya pihak oposisi pada sebuah sistem pemerintahan membuat tidak adanya kontrol pada sistem itu sendiri sehingga menyebabkan kekuasaan dapat dipakai secara semena-mena.

The 1977 election, like all others held under Suharto, was a triumph for the government's party-that-was-not-a-party, Golkar, but not everything went according to plan. The two tame political parties were meant to get some of the vote so that the appearance of democracy could be maintained; however, the vote of one, the Democratic Party (PDI), collapsed markedly. Sukarno's children had been active in this party because it was the successor to the PNI, which had been associated with their father, but because they had been severely restricted from campaigning, voters ignored the PDI in protest. Other limited protests occurred in local elections. Even when there was only one candidate in a local election, New Order attention to formality demanded that there be signs of a choice- the candidate's ballot box was placed next to an empty box. If villagers disapproved of the candidate, they placed their votes in the other slot, and the empty box won the election. (Vickers, 2013:181-182)

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah berkuasa saat itu melakukan pemilihan dengan beberapa partai politik diantaranya PDI dan PPP. Kedua partai tersebut digunakan sebagai kedok agar terlihat demokrasi sedang dijalankan di Indonesia. Tetapi semua tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Salah satu partai yang mengikuti kontestasi, PDI, tidak mendapatkan suara seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh dilarangnya PDI untuk melakukan kampanye dan para pemilih tidak menghiraukan protes yang dilakukan oleh PDI.

The elections held every five years were exercises in controlled aggression. Before these rituals, detailed instructions were given to the relevant

local authorities as to how many votes for the government political vehicle, Golkar, their area was to produce. Failure to do so could result in removal from one's position; success would bring material rewards – prizes such as motorbikes and trips to Singapore. The elections were also ways to draw out potential opposition figures. If local leaders emerged from outside Golkar, they were threatened and badgered into supporting the government. (Vickers, 2013:180-181)

Pemilihan yang dilakukan setiap lima tahun sekali merupakan pelatihan untuk mengontrol agresi. Sebelum pemilihan dilakukan, instruksi secara detail diberikan pada otoritas lokal yang relevan yang berisi berapa banyak suara yang harus dihasilkan untuk Golkar dari daerah mereka. Kegagalan akan berujung pada pencopotan jabatan sedangkan keberhasilan akan diberi hadiah seperti kendaraan bermotor dan perjalanan ke Singapura.

Berdasarkan literatur tersebut, mayoritas masyarakat memiliki pengalaman buruk dengan Partai Golkar. Diantaranya pemerintahan Orde Baru yang otoriter serta banyaknya korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru yang pada saat itu Partai Golkar sedang menjadi satu-satunya *ruling party* sehingga peneliti memandang bahwa pendapat responden merupakan hal yang wajar bahwa walaupun Partai Golkar telah berdiri selama 54 tahun dan pernah berkuasa selama 32 tahun, Partai Golkar masih dianggap belum memahami permasalahan bangsa Indonesia.

Jika dikaitkan dengan *corporate image measurement model*, beberapa pernyataan diatas dapat mewakili bagian *perception* (persepsi). *Perception* adalah sebuah karakteristik yang secara spontan diatributkan kepada sebuah organisasi; sejauh mana responden merasa bahwa berbagai karakteristik yang relevan dapat diterapkan (vos, 2000:122). Pernyataan A2, A3, dan A4 ketiganya mendapatkan mean negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkatan persepsi, mayoritas responden memberikan persepsi negatif kepada Partai Golkar.

Elemen konasi atau pengharapan mendapatkan nilai mean 3.02 yang berarti memiliki nilai lebih besar dari 2.51 dan memiliki arti positif. Pernyataan K1 mendapatkan mean tertinggi dibandingkan dengan dua pernyataan lainnya. K1 dengan “Saya berharap Partai Golkar dapat mencalonkan DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang bersih dan bebas dari jejak korupsi” mendapatkan nilai mean 3.12 yang berarti positif. Selain itu pernyataan K2 dengan “Saya berharap Partai Golkar menjadi partai yang dapat mewakili masyarakat Indonesia” mendapatkan nilai mean

2.86 yang berarti positif. Pernyataan K3 juga mendapatkan nilai mean 3.08 yang berarti positif dengan “Saya berharap Partai Golkar menjadi partai anti korupsi”.

Peneliti memandang temuan yang dijabarkan pada tabel IV.18 memuat hal yang menarik. Walaupun mayoritas responden menjawab di area positif untuk ke tiga pernyataan diatas, ada beberapa persen dari responden yang menjawab tentang pengharapan di area negatif. Berdasarkan wawancara dengan responden, dapat diketahui bahwa beberapa responden yang menjawab area negatif karena sudah tidak mau melihat Partai Golkar memimpin lagi karena memiliki sejarah yang buruk.

“Golkar itu sudah pernah menjabat lama mas jaman Orde Baru. 32 tahun kaya gitu modelnya. Korupsinya banyak mas. Biarpun sudah ganti pemimpin ya mas, saya sudah nggak berani berharap lagi”
Budi, masyarakat Surabaya 13 Februari 2019.

Peneliti menemukan kesamaan dari hasil wawancara dengan responden tersebut dengan beberapa literatur. Berdasarkan Ricklefs dalam bukunya *A History of Modern Indonesia since c.1200*, pada September tahun 1966 Indonesia mengalami inflasi sebesar 600persen, ketersediaan uang berlebih 800 kali dari tahun 1955 dan defisit pemerintahan lebih dari 780 kali dari tahun 1961. Berdasarkan konsultasi dengan IMF, para teknokrat memperkenalkan pengendalian anggaran, suku bunga tinggi, kontrol ekspor yang lebih ketat, dan langkah-langkah anti korupsi yang dimulai pada bulan Oktober. Selain itu, bisnis yang sebelumnya dimiliki oleh Chaerul Saleh dan pemimpin Orde Lama lainnya diambil alih oleh elit-elit Orde Baru. Para elit merasa bermanfaat untuk bekerja dengan *cukong* cina, yang menarik karena akses mereka ke modal, ketajaman bisnis, dan impotensi politik. Selama bertahun-tahun, kekayaan yang mengalir ke tangan elit Indonesia menciptakan kelas atas baru, fondasi sosial utama rezim Soeharto, sementara beberapa keluarga *cukong* bertumbuh sangat kaya.

Indonesia's September 1966 report to its non-communist creditors revealed the scale of economic disaster facing the new regime. Annual inflation was calculated to be in excess of 600 per cent, the money supply was over 800 times the 1955 figure and the government deficit was over 780 times that of 1961 (and 1.8 times the total money supply). In consultation with the IMF, the technocrats introduced budgetary

restraints, high interest rates, stricter export controls and anti-corruption measures beginning in October.

Business empire run by Chaerul Saleh and other leaders of the old order were taken over by new order elite, both the military and their bureaucratic supporters. Ever closer connections were forged between the new Indonesian leadership and the world of private capital. The elite found it useful to work with Chinese cukongs, who were attractive because of their access to capital, business acumen and political impotence. Over the years, the wealth which flowed onto the hands of the Indonesian elite would create a new upper class, the primary social foundation of the soeharto regime, while some cukong families would grow fabulously rich. (Rickliefs, 2008:329)

Walaupun dengan sejarah masa lampau Partai Golkar erat dengan nuansa korupsi, mayoritas responden masih berharap bahwa Partai Golkar dapat menjadi partai anti korupsi dan dapat menjadi partai yang bisa mewakili bangsa Indonesia. Hal ini menjadi salah satu nilai positif bagi citra politik Partai Golkar karena masyarakat masih menaruh harapan pada Partai Golkar agar bisa menjadi partai yang lebih baik lagi.

Berdasarkan olahan data, peneliti tidak menemukan pengaruh antara terpaan pemberitaan Partai Golkar terkait pendaftaran caleg mantan napi korupsi terhadap citra partai Golkar pada masyarakat Surabaya. Namun yang menarik adalah walaupun tidak adanya pengaruh antara variabel X (terpaan pemberitaan) terhadap variabel Y (citra politik), menghasilkan citra Partai Golkar yang sudah negatif tanpa terpaan pemberitaan.

Berdasarkan olahan data dari penulis, responden yang memberikan citra negatif sebesar 70%. Indikator paling negatif dapat dilihat pada elemen afeksi dengan mean 1.84 dibandingkan dengan elemen lainnya. Selain itu, pada elemen kognisi juga mendapatkan nilai mean negatif yaitu sebesar 2,43 dimana angka ini dibawah 2,51 yang merupakan batas dari sebuah citra disebut negatif atau positif. Walaupun mayoritas responden menilai citra Partai Golkar secara keseluruhan dengan hasil negatif, indikator konasi (pengharapan) pada variabel citra politik menunjukkan angka yang sebaliknya yaitu angka positif dengan mean 3,02. Mayoritas responden menyatakan bahwa masih menaruh harapan pada Partai Golkar untuk menjadi partai yang bersih dan anti korupsi. Tetapi, masih ada beberapa responden yang memberi nilai negatif pada elemen konasi yaitu 21% responden.

Dalam penelitian ini, terpaan pemberitaan di media *online* memiliki hubungan dengan citra politik Partai Golkar, namun hubungan antara

terpaan pemberitaan di media *online* dengan citra politik Partai Golkar mengacu ke hubungan yang negatif. Hubungan korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan. Hal ini dikarenakan angka koefisien korelasi -0,203 tersebut negatif sehingga kedua variabel tersebut berlawanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh terpaan pemberitaan Partai Golkar terkait citra Partai Golkar pada masyarakat Surabaya mayoritas responden yang mengisi berjenis kelamin laki-laki serta mayoritas usia >21 tahun, tingkat pendidikan terakhir SMA, pendapatan per bulan 2-3 juta per bulan, bukan merupakan kader atau simpatisan partai tertentu, dan mencoblos kandidat per-seorangan dalam cara memilih calon legislatif.

Mayoritas terpaan media yang dialami oleh responden berada pada tingkat rendah yang berarti responden dalam penelitian ini jarang menonton atau membaca pemberitaan di media, membaca pemberitaan dengan waktu yang singkat, dan dalam membaca berita yang ada tidak sepenuhnya memberikan perhatian pada berita tersebut.

Keseluruhan citra politik Partai Golkar menghasilkan citra negatif. Citra ini tidak dipengaruhi oleh terpaan pemberitaan karena berdasarkan perhitungan hipotesis, H_0 diterima yang berarti tidak adanya pengaruh antara terpaan pemberitaan Partai Golkar terkait pendaftaran caleg mantan napi korupsi terhadap citra Partai Golkar. Citra negatif ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti acara.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala, Siti Karlinah. (2015). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin, Anwar. (2014). *Politik Pencitraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cangara, Hafied. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jefkins, Frank. (2003). *Public Relations (5th ed.)*. Jakarta: Erlangga.
- Jurdi, Fatahullah. (2014). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Kriyantono, Rachmat. (2012). Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana.
- Pilphot, Tasha S. (2010). Race, Republican, and The Return of The Party of Lincoln. Michigan: The University of Michigan Press.
- Sayuti, Solatun Dulah (2014). Komunikasi Pemasaran Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, Ulber (2012). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Stromback, Jesper dan Spiro Kiouisis (2011). Political Public Relations: Principles and Applications. New York: Routledge.
- Sujarweni, V dan Poly Endrayanto.(2012). Statistika Untuk Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujarweni, V Wiratna, (2015). SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Moerdijati, Sri (2012). Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi. Surabaya: Revka Petra Medika.
- Nimmo, Dan. (2005). Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurudin (2014).Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2012). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rickliefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200. New York: Palgrave Macmillan
- Vickers, Adrian. (2013). A History Of Modern Indonesia. New York: Cambridge University Press.

Jurnal:

- Anwar, Muhammad. (2015). Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Elektabilitas Pada Pilkada 2015 Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3, 427-441.
- Hasan, Kamaruddin. (2009). Komunikasi Politik dan Pencitraan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2, 22-43.
- Lampe, Ilyas. (2010). Konsep dan Aplikasi Public Relations Politik Pada Kontestasi Politik di Era Demokrasi (Pemilihan Langsung).*Jurnal ACADEMICA*,2,469-485
- Limbong, Shan Chen. (2014). Studi Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Elektabilitas Partai Demokrat Di Kelurahan

- Bukuan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2, 2546-2557.
- Muchtar, Khoiruddin. (2016). Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. *Jurnal ilmu komunikasi*, 14, 2, 136-147.
- Novianto, R.A., Martha T.L., Sylvie N. (2016). Pengaruh Terpaan Media Terhadap Perubahan Sikap Dari Tayangan Sinetron “7 Manusia Harimau” Di Kalangan Remaja SMA Kota Bandung. *E-proceeding of management*, 3, 830-839.
- Perangin-angin, Loina Lalolo Krina., Zainal, Munawaroh. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 3, 737-753.
- Putri, Yenny Pebriani (2014). Terpaan Program Berita Reportase Investigasi Di Trans 7 Terhadap Persepsi Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Tenggarong. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2, 109-119.
- Rahmaturrizqi, Dkk. (2012). Gender dan Perilaku Memilih: Sebuah Kajian Psikologi Politik. *Jurnal Psikologi: Teori & Terapan*, 3, 49-57.
- Setiawan, Laurensia Imelda. (2015). Citra Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pasca Deklarasi Calon Persiden Dan Calon Wakil Presiden Wiranto-Hary Tanoesoedibjo Di Harian Seputar Indonesia Dan Media Indonesia. *Jurnal E-Komunikasi*, 3, 1-11.

